

BAGIAN ANGGARAN 032



LAPORAN KEUANGAN AUDITED SEMESTER II/TAHUNAN

SATKER BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2024

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KEL. LUBUK MINTURUN, KEC. KOTO TANGAH PADANG –
25175

TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053

LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bpspl.padang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 13 Januari 2025

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang,



Fajar Kurniawan, ST.,M.AP.,M.MG
NIP. 197608042003121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Pernyataan Tanggung Jawab	IV
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca.....	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum.....	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	42
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 13 Januari 2025
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang,



Fajar Kurniawan, ST.,M.AP.,M.MG
NIP. 197608042003121003

Laporan Keuangan Semester II/ Tahunan Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Laporan Realisasi Anggaran adalah Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan Semester II/ Tahunan TA 2024 adalah berupa;

- Pendapatan Negara Bukan Pajak akun 425259 (Pendapatan Perizinan Lainnya) sebesar Rp 273,780,000,- atau mencapai 322.93 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 84,780,000.-
- Pendapatan Negara Bukan Pajak akun 425629 (Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya) sebesar Rp 621,479,085,- atau mencapai 109.95 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 565,220,000.-
- Pendapatan Negara Bukan Pajak akun 425122 (Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin) senilai Rp. 187.832.107,-
- Pendapatan Negara Bukan Pajak akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) senilai Rp. 4,253,811, dan
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp. 425,500,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Semester II/ Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp. 17,394,164,610,- atau mencapai 98.71 % (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 17,622,716,000,- yang terdiri dari;

- Realisasi Belanja Rupiah Murni (APBN) sebesar Rp. 15,359,120,666,- atau mencapai 98.88 % (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15,532,716,000,-
- Realisasi Belanja PNPB sebesar Rp. 2,035,043,944,- atau mencapai 97.37 % (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2,090,000,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai periode 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 tercatat dan disajikan sebesar Rp. 10,782,075,775,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 3,625,800; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 10,778,449,975; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp 574,400 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Ekuitas serta Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 10,781,501,375,- dan Rp 10,782,075,775.-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 899,512,896.- , sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 17,381,953,429.- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (16,482,440,533). Defisit Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp. (467,567,004) dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0.-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 11,425,114,805 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (16,950,007,537) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.

16,306,394,107 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 10,781,501,375,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan periode Semester II/Tahunan TA. 2024 yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun/disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan TA. 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-24		% thd Angg	31 DES TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	650.000.000	1.087.770.503	167,35	963.828.503
JUMLAH PENDAPATAN		650.000.000	1.087.770.503	167,35	963.828.503
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	7.947.856.000	7.936.800.558	99,86	6.338.864.105
Belanja Barang	B.4	9.110.910.000	8.894.742.459	97,63	2.991.393.561
Belanja Modal	B.5	563.950.000	562.621.593	99,76	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		17.622.716.000	17.394.164.610	98,70	9.330.257.666

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG NERACA

PER 31 Desember 2024 dan TA. 2023

(DalamRupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	3,625,800	410,000	3,215,800	784.34
JUMLAH ASET LANCAR	3,625,800	410,000	3,215,800	784.34
ASET TETAP				
Tanah	5,479,100,000	5,479,100,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,676,170,648	5,113,549,055	562,621,593	11.00
Gedung dan Bangunan	4,829,073,000	4,829,073,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,660,000	78,660,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,284,553,673)	(4,735,190,225)	(549,363,448)	11.60
JUMLAH ASET TETAP	10,778,449,975	10,765,191,830	13,258,145	0.12
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	1,480,513,954	(1,480,513,954)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(820,636,009)	820,636,009	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	659,877,945	(659,877,945)	(100.00)
JUMLAH ASET	10,782,075,775	11,425,479,775	(643,404,000)	(5.63)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	574,400	364,970	209,430	57.38
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	574,400	364,970	209,430	57.38
JUMLAH KEWAJIBAN	574,400	364,970	209,430	57.38
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,781,501,375	11,425,114,805	(643,613,430)	(5.63)
JUMLAH EKUITAS	10,781,501,375	11,425,114,805	(643,613,430)	(5.63)
JUMLAH EKUITAS	10,781,501,375	11,425,114,805	(643,613,430)	(5.63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,782,075,775	11,425,479,775	(643,404,000)	(5.63)

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan TA. 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	899,512,896	963,828,503	(64,315,607)	(6.673)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	899,512,896	963,828,503	(64,315,607)	(6.673)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	899,512,896	963,828,503	(64,315,607)	(6.673)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,936,800,558	6,443,837,548	1,492,963,010	23.169
Beban Persediaan	71,132,124	109,399,458	(38,267,334)	(34.979)
Beban Barang dan Jasa	3,940,830,055	2,689,110,696	1,251,719,359	46.548
Beban Pemeliharaan	390,181,043	506,802,908	(116,621,865)	(23.011)
Beban Perjalanan Dinas	4,190,007,797	2,830,097,159	1,359,910,638	48.052
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	299,585,070	299,960,500	(375,430)	(0.125)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	553,416,782	457,405,921	96,010,861	20.99
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	17,381,953,429	13,336,614,190	4,045,339,239	30.333
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(16,482,440,533)	(12,372,785,687)	(4,109,654,846)	33.215
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(467,992,504)	0	(467,992,504)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	187,832,107	0	187,832,107	
Beban Pelepasan Aset	655,824,611	0	655,824,611	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	425,500	0	425,500	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	425,500	0	425,500	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(467,567,004)	0	(467,567,004)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(16,950,007,537)	(12,372,785,687)	(4,577,221,850)	36.994
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(16,950,007,537)	(12,372,785,687)	(4,577,221,850)	36.994

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan TA. 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,425,114,805	11,436,306,839	(11,192,034)	(0.1)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16,950,007,537)	(12,372,785,687)	(4,577,221,850)	36.99
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(62,470,243)	62,470,243	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(62,470,243)	62,470,243	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	16,306,394,107	12,424,063,896	3,882,330,211	31.25
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(643,613,430)	(11,192,034)	(632,421,396)	5,650.64
EKUITAS AKHIR	10,781,501,375	11,425,114,805	(643,613,430)	(5.63)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau pulau kecil terluar serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.65/MEN/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Pertanian Lubuk Minturun, Sei Duo - Sungai Lareh, Padang Propinsi Sumatera Barat.

Salah satu fungsi Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang memberikan dibidang ketata usahaan adalah dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang berkomitmen dengan visi “**mewujudkan**

pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II/Tahunan, Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI adalah Sistem Akuntansi Terintegrasi. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan BMN dan Laporan Persediaan.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Semester II/Tahunan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan – kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara

lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain – Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester dan Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain – lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos – pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, Perbandingan penyajian akun – akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

*Pendapatan Rp
1,087,770,503*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode sampai dengan Semester II/Tahunan TA. 2024 adalah sebesar Rp. 1,087,770,503,- atau mencapai 167,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.650,000,000,-. Pendapatan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut padang terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% REALISASI PENDAPATAN
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,	187.832.107,	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,	4,253,811,	0
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	84.780.000,	273,780,000,	322.93
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	565.220.000,	621,479,085,	109.95
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	425.500,	0
JUMLAH PENDAPATAN		650.000.000,	1,087,770,503,	167.35

Pendapatan pada periode pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp. 187.832.107,-. Pendapatan ini dari hasil penjualan peralatan dan mesin dengan nomor surat risalah lelang S 35/MK.6/KNL.0301/2024 tanggal 26 Maret 2024.
- Pendapatan sewa, tanah, dan gedung bangunan sebesar Rp. 4,253,811,- merupakan sewa dari rumah negara.

- Pendapatan dari jasa kelautan dan perikanan lainnya sebesar Rp. 621,479,085,- merupakan pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.
- Pendapatan perizinan lainnya sebesar Rp. 274,185,000,- merupakan hasil pungutan dari penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.
- Pendapatan penerimaan Kembali belanja barang TAYL sebesar Rp. 425.500,- merupakan nilai pengembalian dari kekurangan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan bangunan kantor.

Realisasi

Belanja Negara

Rp

17,394,164,610

B.2 Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan Semester II/Tahunan TA. 2024 adalah sebesar Rp 17,394,164,610 atau 98.71 % dari anggaran belanja sebesar Rp 17,622,716,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.947.856.000	7.936.800.558	99,86
Belanja Barang	9.110.910.000	8.894.742.459	97,63
Belanja Modal	563.950.000	562.621.593	99,76
Total Belanja Kotor	17.622.716.000	17.394.164.610	98,70
Pengembalian Belanja Pegawai	-	556.499	-
Jumlah	17.622.716.000	17.393.608.111	98,70

Adapun rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas

dan fungsi unit kerja BPSPL Padang.

- b. Belanja barang sebagaimana tersebut diatas merupakan gabungan dari belanja pemeliharaan, belanja jasa, belanja perjalanan, dan belanja operasional yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024, belanja modal yang direalisasikan untuk belanja peralatan dan mesin sebagai penunjang tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Padang.
- d. Sampai dengan periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024, terdapat pengembalian belanja dari belanja pegawai sebesar Rp. 556,499,- yang merupakan pembulatan gaji belanja pegawai dan pengembalian Tunjangan Fungsional PNS.

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp

7,936,800,558,-

Realisasi Belanja Pegawai Periode periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA 2024 sebesar Rp 7,936,800,558 atau sebesar 99.87 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 7,947,856,000,-.

Rincian Belanja Pegawai TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2024
Belanja Gaji dan UM	3.039.930.388
Belanja Tunjangan	767.350.820
Belanja Lembur	54.568.000
Belanja Vakasi	-
Belanja Tunj. Khusus	4.075.507.849
Jumlah Belanja Kotor	7.937.357.057
Pengembalian Belanja Pegawai	556.499
Jumlah Belanja	7.936.800.558

Belanja Pegawai merupakan belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komponen pembentuk belanja pegawai tersebut terdiri dari Belanja Gaji Pokok, Belanja Pembulatan Gaji, Belanja Tunjangan, Belanja Uang Makan, Belanja Lembur, dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan).

Pada periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024 terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp. 556,499,- hal ini merupakan pengembalian atas pembulatan gaji PNS dan Kelebihan Tunjangan Fungsional PNS.

Belanja Barang

Rp

8,894,742,459

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan akhir periode pelaporan Semester II/ Tahunan yaitu 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 8,894,742,459 atau 98 persen dari pagu anggaran Rp. 9,110,910,000,-. Adapun

rincian realisasi masing – masing komponen belanja barang yaitu;

Rincian Belanja Barang TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2024
Belanja Barang Operasional	572.131.202
Belanja Barang Non Operasional	1.054.411.733
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74.347.924
Belanja Jasa	2.314.077.690
Belanja Pemeliharaan	390.181.043
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.190.007.797
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy	299.585.070
Jumlah Belanja Kotor	8.894.742.459
Pengembalian Belanja	-
Jumlah Belanja	8.894.742.459

Belanja Modal
Rp.
562,621,593,-

B.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA 2024 sebesar Rp 562,621,593 atau 99,76 persen dari pagu anggaran Rp. 553,550,000. Realisasi Belanja Modal tersebut merupakan belanja dari peralatan dan mesin berupa; Laptop, PC, LCD, Meubelir, AC, Dispenser, Drone, Battray Drone dan Charger.

Belanja Modal
Tanah
Rp. 0.-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang untuk periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA 2024.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.
562,621,593.-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp 562,621,593. Belanja Peralatan dan Mesin tersebut dapat dirinci pada tabel sebagai berikut;

No	Nama Barang	Jumlah dan Satuan		Nilai	Transaksi Bulan
1	Timbangan Barang	1	Buah	2.092.350	AGUSTUS
2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	6.760.500	FEBRUARI
3	Drone Surveillance	1	Unit	70.650.000	MARET
4	Camera Under Water	1	Buah	17.994.650	MARET
5	P.C Unit	2	Buah	31.300.000	MARET
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Buah	20.400.000	MARET
7	Lap Top	7	Buah	131.950.000	MARET
8	Tablet PC	6	Buah	56.100.000	MARET
9	LCD Projector/Infocus	1	Buah	4.500.000	MARET
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	4.484.693	MEI
11	A.C. Split	2	Buah	10.983.000	MEI
12	Dispenser	1	Buah	3.304.800	MEI
13	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2	Buah	6.438.000	MEI
14	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	dummy	5.998.000	MEI
15	Meja Kerja Kayu	1	Buah	7.000.000	MEI
16	Papan Visual/Papan Nama	3	Buah	7.200.000	SEPTEMBER
17	Lemari Es	1	Buah	2.200.000	SEPTEMBER
18	A.C. Split	2	Buah	13.000.000	SEPTEMBER
19	Meja Kerja Kayu	10	Buah	21.902.680	SEPTEMBER
20	Wastafel Portable	1	unit	3.000.000	SEPTEMBER
21	Lap Top	4	Buah	75.700.000	SEPTEMBER
22	Kursi Besi/Metal	18	Buah	39.352.580	SEPTEMBER
23	Kursi Besi/Metal	3	Buah	3.150.000	OKTOBER
24	Meja Kerja Kayu	1	Buah	4.300.240	OKTOBER
25	LCD Projector	1	Buah	10.400.000	OKTOBER

26	Lemari Besi	1	Buah	2.460.100	NOVEMBER
JUMLAH				562,621,593	

Pengadaan Belanja Modal sampai dengan periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA. 2024 dilakukan dengan 2 mekanisme pembayaran yaitu;

1. Mekanisme Kontraktual melalui LS ke Pihak III sebesar Rp. 427.794.650,-
2. Mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP/TUP) sebesar Rp. 134.826.943,-

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp. 0,-*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp 0,-

*Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan
Rp. 0,-*

B.5.4 Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sampai dengan periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA. 2024 adalah sebesar Rp 0.

*Belanja Modal Lainnya
Rp. 0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp 0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-. Terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp. 0,- ,Kas bank sebesar Rp. 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir

pelaporan 31 Desember 2024 telah disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan bukti penerimaan Negara;

1. Pengembalian TUP PNBPN sebesar Rp. 13,721,702 dengan NTB ; FT2436663V96 dan NTPN; F142B45KQ6NN5B6B dengan tanggal penyetoran 31 Desember 2024
2. Pengembalian TUP APBN/RM sebesar Rp. 40.927.707 dengan NTB ; FT243666VLX50 dan NTPN; DA57F7NAPH18PB9F dengan tanggal penyetoran 31 Desember 2024
3. Pengembalian UP APBN/RM sebesar Rp. 68,535,390 dengan NTB ; FT243666ZHQL9 dan NTPN; 233050JUQSE5HB2K dengan tanggal penyetoran 31 Desember 2024
4. Pengembalian UP PNBPN sebesar Rp. 40.988.400 dengan NTB ; FT243666ZTP9B dan NTPN; A58962CPQHIUBB19 dengan tanggal penyetoran 31 Desember 2024

Persediaan
Rp.
3,625,800,-

C.2 Persediaan

Nilai saldo Persediaan sampai periode pelaporan sebesar Rp. 3,625,800,-. Adapun rincian sisa barang persediaan sampai dengan akhir periode pelaporan Semester II/Tahunan yaitu;

No	Kode Barang (16 Digit)	Uraian Kode Barang	Satuan	Saldo Sistem	Hasil Opsik	KONDISI Baik/Usang/Rusak
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1010301001 000050	Spidol Snowman Hitam	Buah	2	2	Baik
2	1010301001 000082	Pena Joyco Gel GP-265	Buah	2	2	Baik
3	1010301003 000006	Binder Klip No. 200	Buah	2	2	Baik
4	1010301003 000143	Binder Clips 260	Buah	2	2	Baik
5	1010301004 000107	Tip-X Joyco	Buah	1	1	Baik
6	1010301006 000020	Box File Surat Plastik	Pak	3	3	Baik
7	1010301010 000138	Lakban National Bening	Rol	1	1	Baik
8	1010301010 000164	Panfix 1inchi x 72 Yard	Buah	2	2	Baik
9	1010301010 000165	Daimaru Cloth Tape 36x12 Black	rol	3	3	Baik
10	1010301010 000169	Linen Jilid Berry 36 mm	Buah	2	2	Baik
11	1010301010 000170	Linen Jilid Berry 48mm	Buah	2	2	Baik
12	1010301012 000011	Stapler Kangaro HD-10/ID	Buah	4	4	Baik
13	1010302001 000031	Kertas Paper One A4	Dus	2	2	Baik
14	1010302001 000061	Kertas HVS Bola Dunia A4_3	Dus	3	3	Baik
15	1010302002 000061	Kertas Eprint Glossy EcoA4 230g	Buah	1	1	Baik
16	1010304004 000188	Toner Laserjet 85A GG	Buah	4	4	Baik
		TOTAL		36	36	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik Berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan Nomor; BASO-12/BPSPL.1/499346/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024

Tanah

Rp.

5,479,100,000

C.3 Tanah

Saldo Nilai aset tetap berupa tanah periode audited sebesar Rp. 5,479,100,000. Sedangkan saldo nilai tanah periode pelaporan Semester II/Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5,479,100,000. Tidak ada penambahan atas nilai Aset tanah pada periode ini. Tanah tersebut seluas 7.325 meter persegi berlokasi di Jalan Raya Pertanian Sungai Duo – Sungai Lareh Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah ditetapkan status penggunaannya.

Peralatan dan

Mesin

Rp

5,676,170,648

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah Rp 5,113,549,055. Saldo pada Periode pelaporan Semester II/Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5,676,170,648 atau ada peningkatan nilai saldo peralatan dan mesin sebesar Rp. 562,621,593,- atau ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,00 persen. Peralatan dan mesin sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaanya (PSP). Sedangkan penambahan pada periode pelaporan Semester II/Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp. 562,621,593 belum dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP). Untuk saldo peralatan dan mesin pada periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024 telah dilakukan penyusutan sebesar

Rp. 4,380,759,190 ,-. Nilai Penyusutan tersebut dihitung secara otomatis pada aplikasi SAKTI.

*Gedung dan
Bangunan
Rp
4,829,073,000*

C.5 Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4,829,073,000,-. Sedangkan periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024 adalah Rp 4,829,073,000. Tidak ada penambahan/pengurangan pada nilai Gedung dan Bangunan selama periode pelaporan. Selain itu Gedung dan Bangunan yang ada dilingkungan BPSPL Padang secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaanya (PSP). Untuk saldo Nilai Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp. 872,509,268,-. Nilai Penyusutan tersebut dihitung secara otomatis pada aplikasi SAKTI.

*Jalan.Jaringan
dan Irigasi Rp
78,660,000*

C.6 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 78,660,000, sedangkan saldo pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp 78,660,000. Tidak ada penambahan atau pengurangan pada periode pelaporan. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Laporan Keuangan ini yaitu;

No	Uraian	Jumlah
1.	Jalan dan jembatan	22,290,000
2	Irigasi	56,370,000
3	Jaringan lainnya	0
Total		78,660,000

Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaanya (PSP).

Untuk saldo Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024 telah dilakukan

penyusutan sebesar Rp. 22,290,000,-. Nilai Penyusutan tersebut dihitung secara otomatis pada aplikasi SAKTI.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap Rp (5,284,553,673)

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (4,735,190,225), sedangkan per 31 Desember 2024 Rp. (5,284,553,673). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.676.170.648	4.380.759.190	1.295.411.458
2	Gedung dan Bangunan	4.829.073.000	872.509.268	3.956.563.732
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.660.000	31.285.215	402.237.459
4	Aset Tetap Lainnya	0	-	0
Akumulasi Penyusutan		10.583.903.648	5.284.553.673	5.654.212.649

Untuk akumulasi dan penyusutan pada periode pelaporan Semester II/Tahunan TA. 2024 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp. 5,284.553.673,-. Nilai Penyusutan tersebut dihitung secara otomatis pada aplikasi SAKTI.

Uang Muka

dari KPPN Rp 0,-

C.8 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 sebesar Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang

muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
574,400,-

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang periode pelaporan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 574,400,-. Utang kepada pihak Ketiga ini merupakan Belanja Akrual PDAM Bulan Desember 2024 pada Kantor BPSPL Padang dan Wilker BPSPL Padang.

Ekuitas
Rp
10,782.075.77
5

C10. Ekuitas

Pada Laporan Keuangan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 10,782.075.775. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat disajikan sebagai berikut;

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,425,114,805	11,436,306,839	(11,192,034)	(0.1)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16,950,007,537)	(12,372,785,687)	(4,577,221,850)	36.99
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(62,470,243)	62,470,243	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(62,470,243)	62,470,243	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	16,306,394,107	12,424,063,896	3,882,330,211	31.25
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(643,613,430)	(11,192,034)	(632,421,396)	5,650.64
EKUITAS AKHIR	10,781,501,375	11,425,114,805	(643,613,430)	(5.63)

Pendapatan

PNBP

Rp

1,088,175,503

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode pelaporan Semester II/Tahunan - Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,088,175,503. Rincian Laporan pendapatan ini dapat disampaikan sebagai berikut;

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	187,832,107	0	187,832,107	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,253,811	0	4,253,811	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	192,085,918	0	192,085,918	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	84,780,000	274,185,000	405,000	273,780,000	322.93
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	84,780,000	274,185,000	405,000	273,780,000	322.93
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	565,220,000	621,479,085	0	621,479,085	109.95
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	565,220,000	621,479,085	0	621,479,085	109.95
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425,500	0	425,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	425,500	0	425,500	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	650,000,000	1,088,175,503	405,000	1,087,770,503	167.35
	JUMLAH PENDAPATAN	650,000,000	1,088,175,503	405,000	1,087,770,503	167.35

Pendapatan pada periode pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp. 187.832.107,-. Pendapatan ini dari hasil penjualan peralatan dan mesin dengan nomor surat risalah lelang S-35/MK.6/KNL.0301/2024 tanggal 26 Maret 2024.
- Pendapatan sewa, tanah, dan gedung bangunan sebesar Rp. 4,253,811,- merupakan sewa dari rumah negara.
- Pendapatan dari jasa kelautan dan perikanan lainnya sebesar Rp. 621,479,085,- merupakan pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.
- Pendapatan perizinan lainnya sebesar Rp. 274,185,000,- merupakan hasil pungutan dari

penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.

- Pendapatan penerimaan Kembali belanja barang TAYL sebesar Rp. 425.500,- merupakan nilai pengembalian dari kekurangan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan bangunan kantor.

Selain itu periode pelaporan Semester II/Tahunan, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang juga terdapat pengembalian kelebihan setoran PNBPN oleh Pelaku Usaha sebesar Rp. 405.000,-. Adapun berkas administrasi pengembalian tersebut sesuai dengan Penerbitan SKTB untuk Pengembalian PNBPN dari KPPN Nomor S-1700/KPN.0301/2024 Tanggal 15 November 2024

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp

7.936.800.558

Jumlah Beban Pegawai tersaji pada Laporan Keuangan sampai dengan periode pelaporan Semester II/Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp 7.936.800.558,- Adapun Rincian dari Beban pegawai pada pelaporan periode Semester II/Tahunan adalah sebagai berikut;

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
2	3	4
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.494.819.400,
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36.795,
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	192.078.260,
511122	Beban Tunj. Anak PNS	48.132.582,
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	260.830.000,
511125	Beban Tunj. PPh PNS	17.043.338,
511126	Beban Tunj. Beras PNS	137.018.640,
511129	Beban Uang Makan PNS	319.689.000,
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	54.630.000,
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	194.485.600,
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.094,
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.274.880,
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18.360.000,
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.228.120,
511628	Beban Uang Makan PPPK	30.894.000,
512211	Beban Uang Lembur	51.079.000,
512212	Beban Uang Lembur PPPK	3.489.000,
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.817.790.743,
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	257.717.106,
JUMLAH		7.936.800.558,

Beban
Persediaan Rp
71,132,124

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang tersaji pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 71,132,124. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang – barang yang habis pakai, termasuk barang – barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang
dan Jasa Rp
3.940.255.655

D.4 Beban Barang dan Jasa

Pada Laporan Keuangan jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.940.255.655. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Pelaporan Semester II/Tahunan - Tahun 2024

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
2	3	4
521111	Beban Keperluan Perkantoran	264.553.934,
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.637.919,
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104.466.000,
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	190.473.349,
521211	Beban Bahan	641.688.660,
521213	Beban Honor Output Kegiatan	346.372.000,
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	66.351.073,
522111	Beban Langganan Listrik	111.201.834,
522112	Beban Langganan Telepon	7.410.832,
522113	Beban Langganan Air	8.639.245,
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133.986.154,
522141	Beban Sewa	1.078.399.981,
522151	Beban Jasa Profesi	84.700.000,
522191	Beban Jasa Lainnya	889.374.674,
JUMLAH		3.940.255.655,

Beban
Pemeliharaan
Rp
390.181.043

D.5 Beban Pemeliharaan

Sampai dengan Periode pelaporan Semester II/ Tahunan Tahun Anggaran 2024 Beban Pemeliharaan sebesar Rp 390.181.043. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Adapun Rincian beban pemeliharaan untuk periode pelaporan Semester II/ Tahunan TA. 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
2	3	4
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222.490.781,
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167.690.262,
JUMLAH		390.181.043,

- Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan merupakan biaya yang dikeluarkan secara berkala untuk menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik. Biaya pemeliharaan ini tidak dapat dihindari dan harus ditanggung oleh pemilik aset secara berkala. Pemeliharaan tersebut digunakan untuk pengecatan gedung kantor, halaman, dan pembuatan fasilitas pelayanan bagi Disabilitas seperti Parkir khusus disabilitas.
- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin dapat mencakup: Suku cadang, Barang habis pakai, Biaya servis peralatan, Biaya yang memperhitungkan umur aset. Pemeliharaan peralatan dan mesin di BPSPL Padang digunakan untuk servis kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, genset, dan BBM operasional.

Beban

Perjalanan

Dinas Rp

4.190.007.797

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.190.007.797. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
2	3	4
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.314.455.788,
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	261.164.905,
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	382.840.000,
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.231.547.104,
JUMLAH		4.190.007.797,

Beban Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp

299.585.070

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp 299.585.070. Barang yang diserahkan kepada masyarakat/ Kelompok tersebut berupa peralatan dan mesin diantaranya; Pondok Wisata, Mesin Tempel, Mesin Genset, Printer, Tenda, WC Portabel, Papan Nama, Kamera, Alat selam, dan peralatan lainnya. Adapun penerima bantuan tersebut yaitu;

- Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving di Kabupaten Pesisir Selatan – Sumatera Barat, dengan BAST Nomor; B.1451/BPSPL.1/PRL.440/VI/2024 Tanggal 09 Juni 2024 dengan nilai bantuan Rp. 98.670.000,-
- Kelompok Rimba Peduli Lingkungan Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan – Sumatera Barat dengan BAST Nomor; B.1045/BPSPL.1/PRL.440/V/2024

Tanggal 04 Mei 2024 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 100.910.070,-

- Kelompok Lembaga Ekowisata Pulo Aceh (LEPA) di Kabupaen Aceh Besar – Aceh dengan BAST. Nomor B.2122/BPSPL.1/PRL.440/IX/2024 Tanggal 06 September 2024, dengan Nilai Bnatuan yang diserahkan Rp. 100.005.000,-

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi Rp
553.416.782*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 sebesar Rp 553.416.782. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Semester II/Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
2	3	4
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	437.216.390,
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.355.554,
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.592.142,
591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.199.362,
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.053.334,
JUMLAH		553.416.782,

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.
10,782,075,775*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada sampai dengan periode pelaporan Semester II/ Tahunan - Tahun 2024 sebesar Rp 10,782,075,775. Nilai ekuitas awal TA. 2024 lebih kecil dibanding dengan nilai ekuitas awal TA. 2023 yaitu dengan penurunan sebesar (0,1) persen atau Rp. (11,192,034), hal

ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah/besaran DIPA TA. 2024 dengan TA. 2023.

Defisit LO

Rp -

(16,950,007,537)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Pada Laporan Keuangan Jumlah Defisit LO untuk periode pelaporan 31 Desember 2024 sebesar Rp. (16,950,007,537). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Transaksi

Antar Entitas

Rp

16,306,394,107

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode pelaporan 31 Desember 2024 sebesar Rp 16,306,394,107. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Akun	Uraian	2024	2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	17,394,164,610	13,388,427,399
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1,087,770,503)	(963,828,503)
313211	Transfer Keluar	0	(12,250,000)
313221	Transfer Masuk	0	11.715.000
JUMLAH		16,306,394,107	2,424,063,896

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.3.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode pelaporan 31 Desember 2024. DKEL sebesar Rp

17,394,164,610,- sedangkan DDEL sebesar Rp (1,087,770,503).

Ekuitas Akhir *E.4 Ekuitas Akhir*

Rp

10,782,075,77

5

Nilai Ekuitas pada periode pelaporan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10,782,075,775. Nilai ekuitas diakhir periode pelaporan terdapat penurunan dari periode pelaporan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. (643,039,030). Penurunan tersebut karena adanya Penurunan nilai ekuitas sampai akhir periode pelaporan.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian Penting yang dialami Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. DIPA Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 16,904,860,000,- terdiri dari 3 (tiga) Program Utama yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan Program Dukungan Manajemen. Sumber dana pelaksanaan program tersebut berasal dari Rupiah Murni (APBN) dan PNBPN. Porsi Pagu Rupiah Murni sebesar Rp. 15.532.716.000,- sedangkan Pagu PNBPN sebesar Rp. 2.090.000.000,-. Adapun Realisasi penggunaan dari sumber dana tersebut dapat dirinci sebagaimana berikut;

No	Jenis Belanja	Sumber Anggaran							
		Rupiah Murni (RM)				PNBP			
		Pagu	Real	%	Sisa	Pagu	Real	%	Sisa
1	Belanja Pegawai	7.947.856.000	7.936.800.558	99,86	11.055.442				
2	Belanja Barang	7.193.710.000	7.031.964.115	97,75	161.745.885	1.917.200.000	1.862.778.344	97,16	54.421.656
3	Belanja Modal	391.150.000	390.355.993	99,80	794.007	172.800.000	172.265.600	99,69	534.400
Total Anggaran Rupiah Murni (RM)		15.532.716.000	15.359.120.666	98,88	173.595.334				
Total Anggaran PNBPN						2.090.000.000	2.035.043.944	97,37	54.956.056

Porsi pembagian kegiatan operasional dan kegiatan Prioritas Nasional yaitu sebesar 38,83 persen merupakan kegiatan operasional dan 61,65 persen merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Adapun kegiatan Prioritas Nasional dapat dirinci sebagai berikut;

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024	%	SISA ANGGARAN
		10.340.000.000		10.059.189.162	97,28	280.810.838
FD Program Kualitas Lingkungan Hidup		3.970.000.000		3.875.294.730	97,61	94.705.270
FD.2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.170.000.000		3.083.903.894	97,28	86.096.106
FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000		791.390.836	98,92	8.609.164

HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		1.200.000.000	0	1.154.299.851	96,19	45.700.149
HB.2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	100.000.000	0	98.033.999	98,03	1.966.001
HB.2366	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000	0	1.056.265.852	96,02	43.734.148

2. Pada Periode pelaporan Semester II/ Tahunan, BPSPL Padang telah mengusulkan 5 akun signifikan yang akan di kendalikan. Akun tersebut telah disesuaikan dengan Nota Dinas No.992/SJ.2/TU.210/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Akun Signifikan Tahun 2024, yaitu;

- 111611 - Kas Bendahara Pengeluaran
- 132111 - Peralatan dan Mesin
- 425259 - PNB
- 117124 - Bantuan Masyarakat (KOMPAK)
- 117111 - Barang Persediaan Barang Konsumsi

Beberapa akun yang di usulkan tersebut dapat disampaikan pagu anggaran dari masing – masing akun yang dikendalikan yaitu;

- 132111 - Peralatan dan Mesin – Rp. 533.550.000,- terdiri dari pengadaan belanja modal peralatan dan mesin (Laptop, PC, Komputer Tablet, RFID, Kompresor, Kamera Underwater, Drone, dan Lain – lain)
- 117124- Bantuan Masyarakat (KOMPAK) – Rp. 300.000.000,- terbagi untuk 3 kelompok penerima bantuan.
- 117111 - Barang Persediaan Barang Konsumsi – Rp. 50.470.000,- terdiri dari belanja bahan ATK, Komputer supply, dan Bahan pelayanan.
- 425259 – PNB – Target penyerapan 2024 sebesar Rp. 650.000.000,- terdiri dari Pendapatan Perizinan Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan

Mesin, dan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya.

Selain itu, Identifikasi Resiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan PIPK Tahun 2024 BPSPL Padang yaitu;

- 111611 - Kas Bendahara Pengeluaran;
 - Pencatatan Uang Persediaan Tunai
 - Pencatatan Penarikan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai
 - Rekonsiliasi Internal
 - Pencatatan transaksi Uang Persediaan KKP
 - Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran
 - Pengungkapan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 132111 - Peralatan dan Mesin
 - Pencatatan Barang Sesuai Berita Acara Serah Terima
 - Pendetailan jenis Barang
 - Pelaporan Aset
 - Pengungkapan pada CaLK
- 425259 – PNBPN
 - Pencatatan tagihan/billing pada Aplikasi SIMPONI
 - Pelaporan PNBPN- Pendapatan Perijinan Lainnya
 - Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan
- 117124 - Bantuan Masyarakat (KOMPAK)
 - Penginputan/Pencatatan Transaksi Belanja
 - Pelaporan Barang Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada laporan keuangan
 - Pengungkapan informasi belanja Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Catatan laporan keuangan

- 117111 - Barang Persediaan Barang Konsumsi
 - Pencatatan Transaksi Kuitansi belanja Barang Persediaan
 - Pendetailan Barang Persediaan
 - Pemakaian Barang Persediaan
 - Pelaporan Barang Persediaan Konsumsi pada Laporan Keuangan
 - Pengungkapan informasi Persediaan Barang Konsumsi pada Catatan laporan keuangan.

3. Sampai dengan Periode Pelaporan sampai dengan 31 Desember 2024, DIPA BPSPL Padang telah beberapa kali dilakukan penyesuaian/Revisi dengan ruang lingkup antara lain;

- Revisi – I Tanggal 02 Januari 2024; Ruang lingkup revisi berupa pemutakhiran POK dan Pernyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.
- Revisi – II Tanggal 25 Januari 2024; Ruang lingkup revisi berupa buka blokir di akun 2367.CAN.002.052 sebesar Rp 287.000.000 karena sudah ada SEB Clearance TIK.
- Revisi – III Tanggal 16 Februari 2024; Ruang lingkup revisi berupa pemutakhiran POK dan Pernyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.
- Revisi – IV Tanggal 28 Maret 2024; Ruang lingkup revisi pemutakhiran POK
- Revisi – V Tanggal 19 April 2024; Ruang lingkup revisi pemutakhiran POK
- Revisi – VI Tanggal 03 Juni 2024 ; Ruang lingkup revisi pemutakhiran POK
- Revisi – VII Tanggal 20 Juni 2024; Ruang lingkup revisi pemutakhiran POK

- Revisi – VIII Tanggal 11 Juli 2024; Revisi udpating Halaman III DIPA
- Revisi – IX Tanggal 09 September 2024; Revisi udpating Halaman III DIPA
- Revisi – X Tanggal 11 Oktober 2024; Ruang lingkup revisi pmutakhiran POK
- Revisi – XI Tanggal 14 November 2024; Ruang lingkup revisi pmutakhiran POK
- Revisi – XII Tanggal 20 November 2024; Ruang lingkup revisi pmutakhiran POK
- Revisi – XIII Tanggal 02 Desember 2024; Ruang lingkup revisi pmutakhiran POK
- Revisi – XIV Tanggal 12 Desember 2024; Ruang lingkup revisi pmutakhiran POK
- Revisi – XV Tanggal 23 Desember 2024; Ruang lingkup revisi pmutakhiran POK

4. PNBPN sampai dengan periode pelaporan Semester II/ Tahunan Tahun 2024, selain dari pendapatan perijinan lainnya dan penjualan Aset (BMN) juga dapat dirinci dari potongan SPM terkait Pembayaran sewa Rumah Negara (RN) yaitu;

- SPM 007 Tanggal 12 Januari 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari Tahun 2024 untuk 47 Pegawai/120 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,-
- SPM 031 Tanggal 07 Februari 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Maret Tahun 2024 untuk 47 Pegawai/120 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,-
- SPM 094 Tanggal 08 Maret 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan April Tahun 2024 untuk 47 Pegawai/120 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,-

- SPM 151 Tanggal 01 April 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei Tahun 2024 untuk 48 Pegawai/124 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,-
- SPM 184 Tanggal 07 Mei 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Juni Tahun 2024 untuk 48 Pegawai/124 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383
- SPM 244 Tanggal 06 Juni 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Juli Tahun 2024 untuk 48 Pegawai/126 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,-
- SPM 291 Tanggal 25 Juli 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 48 Pegawai/126 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,-
- SPM 316 Tanggal 26 Agustus 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan September Tahun 2024 untuk 48 Pegawai/126 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,-
- SPM 362 Tanggal 02 September 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Oktober Tahun 2024 untuk 48 Pegawai/126 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383,
- SPM 422 Tanggal 02 Oktober 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan November Tahun 2024 untuk 49 Pegawai/130 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383
- SPM 481 Tanggal 07 November 2024 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Desember Tahun 2024 untuk 49 Pegawai/130 Jiwa – Potongan RN (425131) sebesar Rp. 327.383

5. Periode Pelaporan Semester II/ Tahunan TA. 2024 tanggal 31 Desember 2024, terdapat perbedaan antara Beban (LO) dengan Realisasi Belanja Barang dan jasa (LRA) Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih	Keterangan
521111	Beban Keperluan Perkantoran	264.553.934	264.553.934	0	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.637.919	12.637.919	0	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104.466.000	104.466.000	0	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	190.473.349	190.473.349	0	
521211	Beban Bahan	641.688.660	641.688.660	0	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	346.372.000	346.372.000	0	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	66.351.073	66.351.073	0	
522111	Beban Langganan Listrik	111.201.834	111.201.834	0	
522112	Beban Langganan Telepon	7.410.832	7.410.832	0	
522113	Beban Langganan Air	8.639.245	9.004.215	364.970	Akrual PDAM TAYL
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133.986.154	133.986.154	0	
522141	Beban Sewa	1.078.399.981	1.078.399.981	0	
522151	Beban Jasa Profesi	84.700.000	84.700.000	0	
522191	Beban Jasa Lainnya	889.374.674	889.374.674	0	
JUMLAH		3.940.255.655			

Selisih LO – LRA pada akun belanja 522113 (Belanja Langganan Air/PDAM) merupakan selisih belanja akrual PDAM TAYL Dimana transaksi tersebut telah dilakukan penjurnalan pada periode semester I tahun 2024

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO																		
periode : DESEMBER satker : 499346																		
No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)									GAP**	Kode Ket	PN
				Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini						
									RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)				
1	2362	PBW001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50.000.000	49.830.920	99,66	1	Rekomendasi Kebijakan	0	-89	0	1	1	100	0,34	00	PN	
2	2362	PEC001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000	68.126.978	97,32	1	Kesepakatan	2	-74	9,34	2	1	100	2,68	00	PN	
3	2362	QEH001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000	397.071.682	99,27	3	Kelompok Masyarakat	0	-97	0	4	3	100	0,73	00	PN	
4	2362	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	172.800.000	172.265.600	99,69	10	Unit	0	-90	0	10	10	100	0,31	00	Non PN	
5	2362	REB001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	900.000.000	889.604.013	98,84	8	Jenis	10	-77	12	11	8	100	1,16	00	PN	
6	2362	REB002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	1.227.200.000	1.180.024.959	96,16	5	Jenis	8	-80	14	8	5	100	3,84	00	PN	
7	2362	SCC002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya	200.000.000	194.605.775	97,3	30	Orang	15	-70	0	45	30	100	2,7	00	Non PN	

8	2362	UBA001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000	132.373.967	88,25	6	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	6	-89	3	6	6	100	11,75	'02	PN
9	4346	QDD001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	800.000.000	791.390.836	98,92	4	Kelompok Masyarakat	0	-96	0	4	4	100	1,08	00	PN
10	2363	PBW002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	100.000.000	98.033.999	98,03	1	Rekomendasi Kebijakan	0	-99	0	1	1	100	1,97	00	PN
11	2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000	1.056.265.852	96,02	1	Rekomendasi Kebijakan	1	-86	10	1	1	100	3,98	00	PN
12	2367	CAN001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	287.000.000	286.225.650	99,73	15	Unit	0	-85	0	18	15	100	0,27	00	Non PN
13	2367	EBA956	Layanan BMN	62.500.000	60.707.331	97,13	7	Layanan	3	-84	0,02	7	7	100	2,87	00	Non PN
14	2367	EBA957	Layanan Hukum	210.000.000	195.458.144	93,08	1	Layanan	1	-90	3,35	1	1	100	6,92	00	Non PN

15	2367	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	44.233.000	43.248.063	97,77	1	Layanan	1	-90	7,69	1	1	100	2,23	00	Non PN
16	2367	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	209.600.000	206.800.509	98,66	1	Layanan	1	-90	1,36	1	1	100	1,34	00	Non PN
17	2367	EBA994	Layanan Perkantoran	10.992.716.000	10.933.748.121	99,46	1	Layanan	1	-90	8,03	1	1	100	0,54	00	Non PN
18	2367	EBC954	Layanan Manajemen SDM	325.367.000	323.605.900	99,46	45	Orang	0	-55	0	45	45	100	0,54	00	Non PN
19	2367	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	154.500.000	153.929.226	99,63	1	Dokumen	1	-90	8,03	1	1	100	0,37	00	Non PN
20	2367	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000	82.789.987	94,08	1	Dokumen	1	-90	7,36	1	1	100	5,92	00	Non PN
21	2367	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	78.800.000	78.613.597	99,76	1	Dokumen	1	-90	0,02	1	1	100	0,24	00	Non PN

Keterangan selisih/ GAP;

Kegiatan Prioritas Nasional (PN) dan Non Prioritas Nasional, nilai Realisasi penyerapan anggaran lebih tinggi dari capaian rincin output. Hal ini masih dalam batasan gap/selisih untuk output yang tidak dinilai sebagai anomali, karena antara gap dan Progres Capaian Rincian Output (PCRO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA) kurang dari 20% (5% untuk RO strategis) atau lebih besar dari -20% (-5% untuk RO strategis)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:23 AM
Tgl Cetak : 15/01/25 12:06 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	3,625,800	410,000	3,215,800	784.34
JUMLAH ASET LANCAR	3,625,800	410,000	3,215,800	784.34
ASET TETAP				
Tanah	5,479,100,000	5,479,100,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,676,170,648	5,113,549,055	562,621,593	11.00
Gedung dan Bangunan	4,829,073,000	4,829,073,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,660,000	78,660,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,284,553,673)	(4,735,190,225)	(549,363,448)	11.60
JUMLAH ASET TETAP	10,778,449,975	10,765,191,830	13,258,145	0.12
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	1,480,513,954	(1,480,513,954)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(820,636,009)	820,636,009	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	659,877,945	(659,877,945)	(100.00)
JUMLAH ASET	10,782,075,775	11,425,479,775	(643,404,000)	(5.63)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	364,970	(364,970)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	364,970	(364,970)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	364,970	(364,970)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,782,075,775	11,425,114,805	(643,039,030)	(5.63)
JUMLAH EKUITAS	10,782,075,775	11,425,114,805	(643,039,030)	(5.63)
JUMLAH EKUITAS	10,782,075,775	11,425,114,805	(643,039,030)	(5.63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,782,075,775	11,425,479,775	(643,404,000)	(5.63)

Keterangan :
FINAL

Padang, 15 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP
NIP. 197608042003121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:55 AM
Tgl Cetak : 15/01/25 12:07 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,625,800	0
0.0	131111	Tanah	5,479,100,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,676,170,648	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,829,073,000	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	22,290,000	0
0.0	134112	Irigasi	56,370,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,380,759,190
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	872,509,268
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	22,290,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	8,995,215
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,394,164,610
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,087,770,503	0
0.0	391111	Ekuitas	0	11,425,114,805
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	187,832,107
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,253,811
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	273,780,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	621,479,085
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,494,819,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36,795	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	192,078,260	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	48,132,582	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	260,830,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	17,043,338	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	137,018,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	319,689,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	54,630,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	194,485,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,094	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,274,880	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18,360,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,228,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	30,894,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	51,079,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	3,489,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,817,790,743	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	257,717,106	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:55 AM

Tgl Cetak : 15/01/25 12:07 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	264,553,934	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,637,919	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104,466,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	190,473,349	0
3.0	521211	Beban Bahan	641,688,660	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	346,372,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	66,351,073	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	111,201,834	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,410,832	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,639,245	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133,986,154	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,078,399,981	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	84,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	889,374,674	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222,490,781	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167,690,262	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,314,455,788	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	261,164,905	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	382,840,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,231,547,104	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	437,216,390	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109,355,554	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,592,142	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,199,362	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,053,334	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	71,132,124	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	299,585,070	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	655,824,611	0
JUMLAH			35,191,603,591	35,191,603,591

Keterangan :

FINAL

Padang, 15 Januari 2025

Benanggung Jawab UAKPA

KPA

FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP

NP 197608042003121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:23 AM

Tgl Cetak : 15/01/25 12:09 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,394,164,610
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,087,770,503	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	187,832,107
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,253,811
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	274,185,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	621,479,085
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425,500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,494,819,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,294	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	192,078,260	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	48,132,582	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	261,200,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	17,043,338	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	137,018,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	319,689,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	54,815,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	194,485,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,094	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,274,880	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,360,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,228,120	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	30,894,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	51,079,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	3,489,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,817,790,743	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	257,717,106	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	264,553,934	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,637,919	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	104,466,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	190,473,349	0
3.0	521211	Belanja Bahan	641,688,660	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	346,372,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	66,351,073	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74,347,924	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	111,201,834	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	7,410,832	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	9,004,215	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:23 AM
Tgl Cetak : 15/01/25 12:09 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133,986,154	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,078,399,981	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	84,700,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	889,374,674	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222,490,781	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167,690,262	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,314,455,788	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	261,164,905	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	382,840,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,231,547,104	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	299,585,070	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	562,621,593	0
3.1	425259	Pengembalian Pendapatan Perizinan Lainnya	405,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,499
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	370,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
JUMLAH			18,482,896,612	18,482,896,612

Keterangan :
FINAL

Padang, 15 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP
197608042003121003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG 499346

Tgl Data : 15/01/25 6:55 AM
Tgl Cetak : 15/01/25 12:06 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	650,000,000	1,087,770,503	437,770,503	167	524,347,000	963,828,503	(439,481,503)	184
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	650,000,000	1,087,770,503	437,770,503	167	524,347,000	963,828,503	(439,481,503)	184
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	650,000,000	1,087,770,503	437,770,503	167	524,347,000	963,828,503	(439,481,503)	184
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	17,622,716,000	17,394,164,610	(228,551,390)	99	13,755,908,000	13,388,427,399	367,480,601	97
1. Belanja Pegawai	7,947,856,000	7,936,800,558	(11,055,442)	100	6,468,625,000	6,443,837,548	24,787,452	100
2. Belanja Barang	9,110,910,000	8,894,742,459	(216,167,541)	98	6,776,283,000	6,434,239,851	342,043,149	95
3. Belanja Modal	563,950,000	562,621,593	(1,328,407)	100	511,000,000	510,350,000	650,000	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG 499346

Tgl Data : 15/01/25 6:55 AM
Tgl Cetak : 15/01/25 12:06 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	17,622,716,000	17,394,164,610	(228,551,390)	99	13,755,908,000	13,388,427,399	367,480,601	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Padang, 15 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP
NIP 197608042003121003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 499346
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
SUMATERA BARAT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/01/25 12:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 15/1/25 8:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,404,352,000	2,494,820,000	2,494,819,400	0	2,494,819,400	100	600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47,000	43,000	38,294	1,499	36,795	89.06	6,205
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	178,716,000	192,080,000	192,078,260	0	192,078,260	100	1,740
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,421,000	48,420,000	48,132,582	0	48,132,582	99.41	287,418
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	259,700,000	261,200,000	261,200,000	370,000	260,830,000	100	370,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,678,000	17,216,000	17,043,338	0	17,043,338	99	172,662
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	141,254,000	137,019,000	137,018,640	0	137,018,640	100	360
511129	Belanja Uang Makan PNS	429,120,000	324,126,000	319,689,000	0	319,689,000	98.63	4,437,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	54,460,000	55,000,000	54,815,000	185,000	54,630,000	99.66	370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,538,948,000	3,555,124,000	3,550,034,514	556,499	3,549,478,015	99.86	5,645,985
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	41,532,000	194,488,000	194,485,600	0	194,485,600	100	2,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	6,000	4,094	0	4,094	68.23	1,906
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,277,000	7,274,880	0	7,274,880	99.97	2,120
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	20,520,000	18,360,000	0	18,360,000	89.47	2,160,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,014,000	6,229,000	6,228,120	0	6,228,120	99.99	880
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9,324,000	31,072,000	30,894,000	0	30,894,000	99.43	178,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	59,436,000	259,592,000	257,246,694	0	257,246,694	99.1	2,345,306
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	61,800,000	51,600,000	51,079,000	0	51,079,000	98.99	521,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	3,620,000	3,489,000	0	3,489,000	96.38	131,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	61,800,000	55,220,000	54,568,000	0	54,568,000	98.82	652,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,503,523,000	3,820,202,000	3,817,790,743	0	3,817,790,743	99.94	2,411,257
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	66,293,000	257,718,000	257,717,106	0	257,717,106	100	894
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,569,816,000	4,077,920,000	4,075,507,849	0	4,075,507,849	99.94	2,412,151
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,230,000,000	7,947,856,000	7,937,357,057	556,499	7,936,800,558	99.87	11,055,442
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	340,737,000	284,818,000	264,553,934	0	264,553,934	92.89	20,264,066
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	12,792,000	12,637,919	0	12,637,919	98.8	154,081

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 499346
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
SUMATERA BARAT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/01/25 12:10 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 15/1/25 8:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105,096,000	104,952,000	104,466,000	0	104,466,000	99.54	486,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	166,606,000	195,158,000	190,473,349	0	190,473,349	97.6	4,684,651
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	622,039,000	597,720,000	572,131,202	0	572,131,202	95.72	25,588,798
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	530,705,000	667,806,000	641,688,660	0	641,688,660	96.09	26,117,340
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	386,560,000	352,820,000	346,372,000	0	346,372,000	98.17	6,448,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	34,000,000	66,580,000	66,351,073	0	66,351,073	99.66	228,927
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	951,265,000	1,087,206,000	1,054,411,733	0	1,054,411,733	96.98	32,794,267
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59,540,000	74,660,000	74,347,924	0	74,347,924	99.58	312,076
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	59,540,000	74,660,000	74,347,924	0	74,347,924	99.58	312,076
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	113,400,000	111,600,000	111,201,834	0	111,201,834	99.64	398,166
522112	Belanja Langganan Telepon	15,000,000	7,860,000	7,410,832	0	7,410,832	94.29	449,168
522113	Belanja Langganan Air	10,500,000	9,240,000	9,004,215	0	9,004,215	97.45	235,785
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	116,400,000	136,680,000	133,986,154	0	133,986,154	98.03	2,693,846
522141	Belanja Sewa	1,101,400,000	1,085,950,000	1,078,399,981	0	1,078,399,981	99.3	7,550,019
522151	Belanja Jasa Profesi	98,600,000	86,100,000	84,700,000	0	84,700,000	98.37	1,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	807,109,000	897,045,000	889,374,674	0	889,374,674	99.14	7,670,326
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,262,409,000	2,334,475,000	2,314,077,690	0	2,314,077,690	99.13	20,397,310
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242,055,000	225,265,000	222,490,781	0	222,490,781	98.77	2,774,219
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	204,820,000	169,592,000	167,690,262	0	167,690,262	98.88	1,901,738
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	446,875,000	394,857,000	390,181,043	0	390,181,043	98.82	4,675,957
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,407,991,000	2,382,369,000	2,314,455,788	0	2,314,455,788	97.15	67,913,212
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	298,200,000	276,000,000	261,164,905	0	261,164,905	94.62	14,835,095
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	454,120,000	383,800,000	382,840,000	0	382,840,000	99.75	960,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,253,871,000	1,279,823,000	1,231,547,104	0	1,231,547,104	96.23	48,275,896
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,414,182,000	4,321,992,000	4,190,007,797	0	4,190,007,797	96.95	131,984,203
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	365,000,000	300,000,000	299,585,070	0	299,585,070	99.86	414,930
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	365,000,000	300,000,000	299,585,070	0	299,585,070	99.86	414,930

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 032
: 07
: 0800
: 499346
: KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
SUMATERA BARAT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/01/25 12:10 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 15/1/25 8:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,121,310,000	9,110,910,000	8,894,742,459	0	8,894,742,459	97.63	216,167,541
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553,550,000	563,950,000	562,621,593	0	562,621,593	99.76	1,328,407
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	553,550,000	563,950,000	562,621,593	0	562,621,593	99.76	1,328,407
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	553,550,000	563,950,000	562,621,593	0	562,621,593	99.76	1,328,407
	JUMLAH BELANJA	16,904,860,000	17,622,716,000	17,394,721,109	556,499	17,394,164,610	98.71	228,551,390

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 499346

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 15/01/25 12:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,404,352,000	2,494,820,000	2,494,819,400	0	2,494,819,400	100	600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47,000	43,000	38,294	1,499	36,795	85.57	6,205
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	178,716,000	192,080,000	192,078,260	0	192,078,260	100	1,740
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,421,000	48,420,000	48,132,582	0	48,132,582	99.41	287,418
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	259,700,000	261,200,000	261,200,000	370,000	260,830,000	99.86	370,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,678,000	17,216,000	17,043,338	0	17,043,338	99	172,662
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	141,254,000	137,019,000	137,018,640	0	137,018,640	100	360
511129	Belanja Uang Makan PNS	429,120,000	324,126,000	319,689,000	0	319,689,000	98.63	4,437,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	54,460,000	55,000,000	54,815,000	185,000	54,630,000	99.33	370,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	41,532,000	194,488,000	194,485,600	0	194,485,600	100	2,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	6,000	4,094	0	4,094	68.23	1,906
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,277,000	7,274,880	0	7,274,880	99.97	2,120
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	20,520,000	18,360,000	0	18,360,000	89.47	2,160,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,014,000	6,229,000	6,228,120	0	6,228,120	99.99	880
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9,324,000	31,072,000	30,894,000	0	30,894,000	99.43	178,000
512211	Belanja Uang Lembur	61,800,000	51,600,000	51,079,000	0	51,079,000	98.99	521,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	3,620,000	3,489,000	0	3,489,000	96.38	131,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,503,523,000	3,820,202,000	3,817,790,743	0	3,817,790,743	99.94	2,411,257
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	66,293,000	257,718,000	257,717,106	0	257,717,106	100	894
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	7,230,000,000	7,947,856,000	7,937,357,057	556,499	7,936,800,558	99.87	11,055,442
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	340,737,000	284,818,000	264,553,934	0	264,553,934	92.89	20,264,066
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	12,792,000	12,637,919	0	12,637,919	98.8	154,081
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105,096,000	104,952,000	104,466,000	0	104,466,000	99.54	486,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	166,606,000	195,158,000	190,473,349	0	190,473,349	97.6	4,684,651
521211	Belanja Bahan	444,400,000	569,553,000	544,868,773	0	544,868,773	95.67	24,684,227
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	208,960,000	205,940,000	199,812,000	0	199,812,000	97.02	6,128,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24,000,000	63,600,000	63,383,073	0	63,383,073	99.66	216,927
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,000,000	65,700,000	65,457,924	0	65,457,924	99.63	242,076
522111	Belanja Langganan Listrik	113,400,000	111,600,000	111,201,834	0	111,201,834	99.64	398,166
522112	Belanja Langganan Telepon	15,000,000	7,860,000	7,410,832	0	7,410,832	94.29	449,168
522113	Belanja Langganan Air	10,500,000	9,240,000	9,004,215	0	9,004,215	97.45	235,785
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	116,400,000	136,680,000	133,986,154	0	133,986,154	98.03	2,693,846
522141	Belanja Sewa	1,054,700,000	1,037,790,000	1,031,899,981	0	1,031,899,981	99.43	5,890,019
522151	Belanja Jasa Profesi	77,900,000	72,800,000	71,400,000	0	71,400,000	98.08	1,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	784,909,000	856,745,000	849,174,674	0	849,174,674	99.12	7,570,326
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242,055,000	225,265,000	222,490,781	0	222,490,781	98.77	2,774,219

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 499346

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 15/01/25 12:10 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	204,820,000	169,592,000	167,690,262	0	167,690,262	98.88	1,901,738
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,436,066,000	1,432,492,000	1,378,318,659	0	1,378,318,659	96.22	54,173,341
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95,850,000	135,600,000	122,264,905	0	122,264,905	90.17	13,335,095
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	424,240,000	315,100,000	315,100,000	0	315,100,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	980,871,000	880,433,000	866,783,776	0	866,783,776	98.45	13,649,224
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	300,000,000	300,000,000	299,585,070	0	299,585,070	99.86	414,930
	JUMLAH BELANJA BARANG	7,204,110,000	7,193,710,000	7,031,964,115	0	7,031,964,115	97.75	161,745,885
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380,750,000	391,150,000	390,355,993	0	390,355,993	99.8	794,007
	JUMLAH BELANJA MODAL	380,750,000	391,150,000	390,355,993	0	390,355,993	99.8	794,007
	JUMLAH RUPIAH MURNI	14,814,860,000	15,532,716,000	15,359,677,165	556,499	15,359,120,666	98.89	173,595,334
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	86,305,000	98,253,000	96,819,887	0	96,819,887	98.54	1,433,113
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	177,600,000	146,880,000	146,560,000	0	146,560,000	99.78	320,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,000,000	2,980,000	2,968,000	0	2,968,000	99.6	12,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,540,000	8,960,000	8,890,000	0	8,890,000	99.22	70,000
522141	Belanja Sewa	46,700,000	48,160,000	46,500,000	0	46,500,000	96.55	1,660,000
522151	Belanja Jasa Profesi	20,700,000	13,300,000	13,300,000	0	13,300,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	22,200,000	40,300,000	40,200,000	0	40,200,000	99.75	100,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	971,925,000	949,877,000	936,137,129	0	936,137,129	98.55	13,739,871
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	202,350,000	140,400,000	138,900,000	0	138,900,000	98.93	1,500,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29,880,000	68,700,000	67,740,000	0	67,740,000	98.6	960,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	273,000,000	399,390,000	364,763,328	0	364,763,328	91.33	34,626,672
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	65,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,917,200,000	1,917,200,000	1,862,778,344	0	1,862,778,344	97.16	54,421,656
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172,800,000	172,800,000	172,265,600	0	172,265,600	99.69	534,400
	JUMLAH BELANJA MODAL	172,800,000	172,800,000	172,265,600	0	172,265,600	99.69	534,400
	JUMLAH PNBP	2,090,000,000	2,090,000,000	2,035,043,944	0	2,035,043,944	97.37	54,956,056
	TOTAL	16,904,860,000	17,622,716,000	17,394,721,109	556,499	17,394,164,610	98.71	228,551,390

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 499346

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
SUMATERA BARAT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 15/01/25 12:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	187,832,107	0	187,832,107	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,253,811	0	4,253,811	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	192,085,918	0	192,085,918	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	84,780,000	274,185,000	405,000	273,780,000	322.93
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	84,780,000	274,185,000	405,000	273,780,000	322.93
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	565,220,000	621,479,085	0	621,479,085	109.95
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	565,220,000	621,479,085	0	621,479,085	109.95
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425,500	0	425,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	425,500	0	425,500	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	650,000,000	1,088,175,503	405,000	1,087,770,503	167.35
	JUMLAH PENDAPATAN	650,000,000	1,088,175,503	405,000	1,087,770,503	167.35

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:55 AM
Tgl Cetak : 15/01/25 12:03 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	899,512,896	963,828,503	(64,315,607)	(6.673)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	899,512,896	963,828,503	(64,315,607)	(6.673)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	(899,512,896)	(963,828,503)	64,315,607	(6.673)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,936,800,558	6,443,837,548	1,492,963,010	23.169
Beban Persediaan	71,132,124	109,399,458	(38,267,334)	(34.979)
Beban Barang dan Jasa	3,940,255,655	2,689,110,696	1,251,144,959	46.526
Beban Pemeliharaan	390,181,043	506,802,908	(116,621,865)	(23.011)
Beban Perjalanan Dinas	4,190,007,797	2,830,097,159	1,359,910,638	48.052
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	299,585,070	299,960,500	(375,430)	(0.125)

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:55 AM

Tgl Cetak : 15/01/25 12:03 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	553,416,782	457,405,921	96,010,861	20.99
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	(17,381,379,029)	(13,336,614,190)	(4,044,764,839)	30.328
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	16,481,866,133	12,372,785,687	4,109,080,446	33.211
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(467,992,504)	0	(467,992,504)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	(187,832,107)	0	(187,832,107)	()
Beban Pelepasan Aset	(655,824,611)	0	(655,824,611)	()
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	425,500	0	425,500	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(425,500)	0	(425,500)	()
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(467,567,004)	0	(467,567,004)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	16,949,433,137	12,372,785,687	4,576,647,450	36.99
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	16,949,433,137	12,372,785,687	4,576,647,450	36.99

Keterangan :
FINAL

Padang, 15 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP
NIP 197608042003121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (499346) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 15/01/25 6:23 AM

Tgl Cetak : 15/01/25 12:03 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,425,114,805	11,436,306,839	(11,192,034)	(0.1)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16,949,433,137)	(12,372,785,687)	(4,576,647,450)	36.99
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(62,470,243)	62,470,243	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(62,470,243)	62,470,243	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	16,306,394,107	12,424,063,896	3,882,330,211	31.25
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(643,039,030)	(11,192,034)	(631,846,996)	5,645.51
EKUITAS AKHIR	10,782,075,775	11,425,114,805	(643,039,030)	(5.63)

Keterangan :

FINAL

Padang, 15 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ASAR KURNIAWAN, ST.,M.AP

NIP 197608042003121003

